

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Eko Setiawan¹

¹Universitas Brawijaya Malang

E-mail: oke.setia@gmail.com

Abstract

The issue of gender equality is mainly reflected in terms of access to opportunities and possibilities, participation in decision-making processes, control of resources and benefits from agricultural development outcomes. Women's traditional rights, including children's rights, are not diminished due to the utilization of agricultural natural resources and their products. Equality of access of women and men to information on the use of capital, agricultural facilities and infrastructure must also continue to be fought. The purpose of writing this article is to analyze the concept of gender in wages and the division of agricultural labor and the role of women in agricultural development. Using literature study research, in the form of a series of activities related to library data collection methods, reading and recording, and managing research materials. Data collection comes from textbooks, national and international online journals, scientific articles, literature reviews containing the concept of gender in agricultural development. The results showed that development in agriculture, the role of women tends to be less meaningful and gender inequality occurs. This also applies to agriculture, where women are given "feminine" work that requires accuracy, patience and is not too heavy.

Keywords: Gender Equality, Development, Agriculture

Abstrak

Isu kesetaraan gender terutama tercermin dalam hal akses terhadap peluang dan kemungkinan, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penguasaan sumber daya dan manfaat dari hasil pembangunan pertanian. Hak-hak tradisional perempuan, termasuk hak anak-anak, tidak berkurang karena pemanfaatan sumber daya alam pertanian dan produk-produknya. Kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap informasi penggunaan modal, sarana dan prasarana pertanian juga harus terus diperjuangkan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis konsep gender dalam pengupahan dan pembagian kerja pertanian dan peran perempuan dalam pembangunan pertanian. Menggunakan penelitian studi kepustakaan, berupa serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Pengumpulan data berasal dari *textbook*, jurnal online nasional dan internasional, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep gender dalam pembangunan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan dalam bidang pertanian, peran perempuan cenderung kurang berarti dan terjadi ketidaksetaraan gender. Hal ini juga berlaku pula di pertanian, dimana perempuan diberi jatah pekerjaan yang bersifat feminim yang membutuhkan ketelitian, kesabaran dan tidak terlalu berat.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Pembangunan, Pertanian		
Received 2024-01-09	Revised 2024-03-30	Accepted 2024-05-01

PENDAHULUAN

Telah terjadi ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam bidang pertanian yang ditunjukkan oleh keterbatasan peran-peran perempuan dalam pembangunan pertanian. Peran perempuan tersubordinasi pada pekerjaan yang sederhana, sementara peran laki-laki dalam pertanian lebih menonjol terutama pada proses produksi. Ketidaksetaraan gender tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial-budaya dan memandang peran perempuan sebatas pelengkap. Keunggulan laki-laki dipandang sebagai sesuatu yang alamiah (Budiman, 1985). Sebagai contoh, banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan laki-laki.

Selain itu permasalahan dalam bidang pertanian, perempuan pada umumnya tersisih dari peranan produktif secara ekonomi. Laki-laki mengendalikan sektor produksi, sementara perempuan menjalankan fungsi-fungsi kerumahtanggaannya. Ruang publik didominasi oleh laki-laki yang mencakup ekonomi, politik, kehidupan agama, pendidikan, dan kegiatan lain di luar rumah. Lingkup domestik diperankan oleh perempuan seperti urusan memasak, mencuci, mengurus anak. Dikotomi ini membawa akibat berupa lahirnya ideologi gender yang menjunjung superioritas alamiah laki-laki dan inferioritas alamiah perempuan. Pola relasi gender dalam masyarakat agraris ditandai dengan ciri-ciri masyarakat patriarkhi, yang memberikan peranan lebih besar kepada laki-laki, di mana perempuan disisihkan dan dibatasi dari berbagai kegiatan mereka, seperti dilarang memiliki hak milik, terlibat dalam politik, mengejar pendidikan, dan mendapat pengawasan ketat dalam berbagai kegiatan.

Masalah patriarki ini menjadi salah satu sebab dari sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Sistem patriarki yang berlaku di masyarakat telah mensubordinasi dan mendiskriminasi kaum perempuan atas tubuh, seksualitas, pekerjaan, peran dan statusnya baik dalam keluarga maupun masyarakat. Fisher (2015) & Carr (2014), menunjukkan bahwa perbedaan akses terhadap sumber daya produktif di Uganda Timur berkontribusi terhadap

kecenderungan laki-laki yang lebih besar untuk mengadopsi jagung yang tahan kekeringan dibandingkan perempuan. Perempuan di Tanzania dan Uganda, lebih menghindari resiko dibandingkan laki-laki, cenderung tidak mengadopsi varietas DTM jika mereka mengalami guncangan iklim atau musim kemarau (Teklewold et al., 2020). Cullen et al., (2018) & Quinn et al., (2003) , dalam penelitiannya terhadap para petani dan penggembala di Tanzania dan Mali, juga menyatakan bahwa peran gender dalam pekerja dapat mempengaruhi persepsi resiko, karena resiko yang terkait dengan modal alam berupa tanah, cuaca, penyakit ternak dianggap lebih tinggi oleh laki-laki. Sedangkan hal-hal yang terkait dengan modal manusia, kelaparan, akses terhadap air, akses terhadap layanan kesehatan dianggap lebih tinggi oleh perempuan.

Perbedaan gender ini biasanya diabaikan dalam berbagai penelitian seperti yang ditunjukkan dalam tinjauan global (Duong et al., 2019). Memahami apakah dan bagaimana persepsi resiko berbeda berdasarkan gender akan memungkinkan penargetan teknologi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan subkelompok tertentu (Cullen et al., 2018) . Selain masalah sistem pembagian kerja antara buruh tani laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki yang berlaku dalam masyarakat serta perbedaan alat dan fungsi reproduksi dari laki-laki dan perempuan yang secara biologis berbeda yang melahirkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (gender), sistem pengupahan yang merugikan bagi kaum perempuan sangat menarik untuk ditinjau lebih jauh.

KERANGKA TEORI

Gender mempengaruhi persepsi resiko di komunitas petani, sebagian disebabkan oleh norma sosio-kultural mengenai gender serta peran dan tanggung jawab rumah tangga yang spesifik gender. Penelitian empiris menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki preferensi yang berbeda dalam memilih tanaman dan varietas, di mana perempuan mempertimbangkan ketahanan pangan dan pengurangan risiko, sedangkan laki-laki mempertimbangkan hasil yang tinggi (Rengalakshmi et al., 2018; Teklewold et al., 2020) . Peran perempuan dalam menyiapkan makanan dapat mempengaruhi kekhawatiran mereka terhadap resiko ketersediaan pangan (Barrett et al., 2001; Smith et al., 2000) . Menyoroti beberapa alasan mengapa perempuan lebih rentan terhadap guncangan produksi dan pendapatan terkait iklim (Timu et al., 2021). Hal ini mencakup lebih sedikit pilihan untuk mengelola resiko karena berkurangnya kepemilikan dan kendali atas aset produktif dan terbatasnya

mobilitas untuk mengakses layanan pertanian karena waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas reproduksi.

Meskipun perempuan memainkan peran penting dalam pertanian dan produksi pangan, mereka seringkali menghadapi lebih banyak tantangan dalam mengadopsi teknologi pertanian jika dibandingkan dengan laki-laki (Meinzen-Dick et al., 2011). Sudut pandang gender mengungkapkan beberapa perbedaan dalam persepsi resiko. Dengan menyoroti perbedaan-perbedaan ini dan menarik perhatian pada peran gender dan norma sosial yang mendasarinya. Berkontribusi pada perdebatan mengenai penguatan ketahanan petani kecil laki-laki dan perempuan. Mengambil perspektif kehidupan petani kecil yang mengoptimalkan tenaga kerja untuk memperoleh pendapatan (de Janvry et al., 1991; Harwood et al., 1999; Key et al., 2000; Murray-Prior, 1998; Vakis et al., 2004). Seringkali terjadi bersamaan dengan tidak adanya pilihan manajemen institusional (Hansen et al., 2019). Kasus mengenai ketidakterpisahan antara keputusan konsumsi dan produksi, bahwa berbagai resiko pertanian tidak dapat dipisahkan, mengingat kegagalan pasar kredit dan asuransi. Selain resiko produksi, petani kecil laki-laki dan perempuan juga mengalami kecemasan yang sama terhadap resiko terkait kesehatan, norma sosial dan kendala sosial.

Resiko pertanian terkait kesehatan paling tinggi terjadi ketika pangan langka dan investasi input pertanian diperlukan. Hal ini penting karena masa kelaparan bertepatan dengan masa puncak buruh tani, yang bertepatan dengan masa ketika keluarga mempunyai lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Resiko pertanian yang tidak dapat dipisahkan ini menggambarkan pentingnya pendekatan manajemen resiko ganda dalam upaya adopsi teknologi pertanian. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pengaruh berbagai resiko yang saling berinteraksi terhadap tingkat penghindaran resiko dan apakah terdapat perbedaan gender. Hasil yang diperoleh akan memberikan informasi mengenai perlunya memperluas cakupan paket asuransi pertanian, yang mencakup berbagai resiko, tidak hanya resiko produksi, dan apakah paket tersebut perlu dibuat khusus untuk laki-laki dan perempuan di berbagai wilayah, dengan mengatasi persepsi resiko dan permasalahan mata pencaharian mereka.

METODE

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, berupa serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan yang mempunyai tujuan, mencari dasar pondasi pijakan untuk membangun

landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan hipotesis penelitian. Kelebihan studi kepustakaan, mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Studi kepustakaan dilakukan setelah ditentukan topik penelitian dan ditetapkan rumusan permasalahan, sebelum peneliti turun ke lapang untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data berasal dari *textbook*, jurnal online nasional dan internasional, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep gender dalam pembangunan pertanian. Peneliti melakukan pencarian jurnal yang dipublikasikan di internet menggunakan *search engine ProQuest, PubMed, Research Gate, SagePub dan Scholar*. Baik jurnal ilmiah nasional maupun internasional sejumlah 20 artikel dalam kurun waktu tahun 1991-2021.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan penyaringan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh penulis dari setiap jurnal yang diambil. Analisa data dimulai dengan menganalisa jurnal penelitian yang sesuai dengan tema, kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, rancangan studi, tujuan penelitian, dan ringkasan hasil temuan. Ringkasan jurnal penelitian tersebut kemudian dimasukkan dalam tabel diurutkan sesuai alfabel dan tahun terbit jurnal.

TEMUAN PENELITIAN

Kesetaraan gender dalam pembangunan pertanian kini menjadi perhatian utama masyarakat internasional. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis kesetaraan gender dalam pembangunan pertanian di dunia saat ini berdasarkan literatur masa lalu. Juga mengeksplorasi potensi mekanisme dampak kesetaraan gender. Kesetaraan gender diartikan sebagai kondisi tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai indikator hak sosial dan budaya (Harvey et al., 1990). Kesetaraan gender merupakan isu lama yang banyak dibicarakan, seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan tenaga produktif, status sosial perempuan telah mengalami berbagai perubahan. Dalam masyarakat modern dengan pesatnya kemajuan tenaga produktif, kesetaraan gender telah menjadi salah satu tren signifikan dalam pertumbuhan peradaban sosial. Karena kemampuan kerja fisik perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki, di masa lalu ketika kerja fisik merupakan tenaga produktif utama, laki-laki mendominasi masyarakat.

Kesetaraan gender seharusnya tidak hanya tercermin dalam sektor pertanian, namun juga tercermin dalam banyak aspek, seperti gerakan feminis masyarakat sipil, pemilihan wakil perempuan di parlemen (Aboim, 2010; Walby, 2004). Satu fakta yang jelas adalah bahwa negara-negara UE telah memberikan

kontribusi untuk mendorong kesetaraan gender, karena kebijakan kesetaraan gender mereka telah menjadi isu yang kuat dalam pembangunan UE selama 20 tahun. Beberapa dokumen penting berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan kerja sama, misalnya Rencana Aksi Gender (GAP II) tahun 2015 (Allwood, 2020). Karena alasan sejarah dan agama, perempuan kulit hitam memiliki sedikit peluang untuk maju di tempat kerja dibandingkan perempuan kulit putih. Gaji rata-rata perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki (Corbett & Hill, 2012).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pembinaan kesetaraan gender dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Penting tidak hanya untuk memberikan persamaan hak kepada perempuan, tetapi juga untuk menciptakan iklim sosial yang menguntungkan semua orang (Looze et al., 2018). Di Tiongkok, perempuan menduduki peran tradisional, termasuk tanggung jawab keluarga dan memberikan dukungan kepada suami. Misalnya, kepercayaan tradisional Tiongkok menekankan bahwa perempuan bertanggung jawab mengatur urusan keluarga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab menghidupi anggota keluarga dengan mendapatkan penghasilan melalui usaha mereka di sektor publik. Aspek psikososial dari sikap budaya ini juga dihadapi oleh perempuan Singapura (Cong, 2008). Di India, pandangan tradisional serupa juga ada yang menyiratkan bahwa perempuan harus memainkan peran mereka dengan baik dalam status tradisional dan stereotip gender untuk memenuhi harapan masyarakat. Hal ini menyebabkan perempuan diperlakukan secara berbeda di lingkungan keluarga dan tempat kerja (Budhwar et al., 2005).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, kesetaraan gender di kawasan Asia-Pasifik mengalami tingkat perkembangan yang berbeda-beda di berbagai wilayah. Dalam hal masalah kesehatan, perempuan di Asia Selatan dengan tingkat kematian yang lebih besar dibandingkan wilayah lain di dunia kecuali Afrika (Bui et al., 2018). Mengenai pembayaran di tempat kerja, di Bangladesh, perempuan memperoleh penghasilan 50% lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan di India angka tersebut adalah 80%. Kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki di Tiongkok lebih kecil dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik (Cong, 2008).

Dalam dua dekade terakhir, setelah disetujuinya Platform Aksi Beijing, kemajuan nyata telah dicapai dalam penghapusan diskriminasi gender dan perlindungan hak-hak perempuan di Asia-Pasifik (Cai & Dahiya, 2020). Kesimpulannya, di dunia secara umum telah mencapai kemajuan dalam mengatasi ketidaksetaraan gender. Namun kelemahan dari ketidaksetaraan gender masih berdampak pada berbagai komponen penting masyarakat, seperti

pendidikan, gaji, keluarga, dan lain-lain. Negara-negara di seluruh dunia perlu melakukan upaya terus-menerus untuk mencapai tingkat kesetaraan gender yang lebih tinggi dan menjamin hak-hak perempuan, yaitu: kondusif bagi perkembangan perekonomian dan peradaban umat manusia.

PEMBAHASAN

Konsep Gender Dalam Pengupahan dan Pembagian Kerja Pertanian

Konsep gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Dapat dikatakan gender sebagai konsep sosial untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena diantara keduanya terdapat perbedaan biologis, tetapi dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Handayani & Sugiarti, 2002). Peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk nilai-nilai adat, pendidikan, agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai hasil bentukan sosial, tentunya peran gender bisa berubah-ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang berbeda sehingga sangat mungkin dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, misalnya kontribusi perempuan tani dalam pembangunan pertanian cukup besar. Mereka bekerja dalam beberapa aspek produksi, pasca panen, distribusi pangan dan konsumsi. Mereka tidak saja berperan pada kegiatan pertanian yang bertujuan dalam menambah penghasilan keluarga, namun mereka juga ikut dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai negara agraris yang luas, jumlah perempuan usia di atas 10 tahun dalam sektor pertanian luas yang berada di wilayah pedesaan mencapai 40 persen. Berbagai penelitian dalam sektor pertanian menunjukkan, bahwa peran perempuan dalam kegiatan pertanian sangat substansial. Berdasarkan studi Kabeer (1999) dan proyek *Enabling Gender Equality in Agricultural and Environmental Innovation* (Badstue et al., 2014), menganggap perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam menuntut dan mengadopsi teknologi baru karena adanya perbedaan kendala dalam hal teknologi pertanian serta peluang yang tersedia bagi mereka. Penelitian pertanian untuk pendekatan pembangunan sering mengabaikan norma-norma sosial, sikap, dan distribusi kekuasaan dan sumber daya yang secara berbeda mbingkai persepsi perempuan dan laki-laki dan kapasitas untuk memanfaatkan peluang (Badstue et al., 2020). Norma gender, mengacu pada

ekspektasi dan peran masyarakat berdasarkan gender, kemampuan dan kemauan perempuan untuk mengekspresikan hak pilihan mereka, mempengaruhi cara perempuan terlibat dan mengadopsi teknologi pertanian. Memperkenalkan teknologi baru juga dapat melibatkan negosiasi ulang hubungan kekuasaan untuk menjamin manfaat bagi laki-laki dan perempuan (Farnworth et al., 2020). Oleh karena itu dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti peran gender, kendali atas sumber daya produktif, suara dalam proses pengambilan keputusan pertanian, dan struktur normatif lokal seputar hubungan gender untuk menilai persepsi resiko petani dan pengaruhnya terhadap pilihan investasi pertanian. Selain itu, berbagai kelompok perempuan dan laki-laki dapat mengalami tantangan dalam mengadopsi jagung yang tahan kekeringan karena sifat-sifat selain gender, seperti etnis, kelas kekayaan, dan tahap kehidupan (Carr & Thompson, 2014 ; Fisher & Carr, 2015). Namun, karena keterbatasan terkait proyek dan keterbatasan lainnya, kami membandingkan trend antara kelompok agregat perempuan dan laki-laki untuk penelitian ini.

Kesemuanya menyebut adanya pembagian kerja seksual dimana perempuan melakukan kerja selama proses produksi yang meliputi penanaman, penyiangan, pemeliharaan, panen, pasca panen, pemasaran, baik yang bersifat manajerial tenaga buruh, pada komoditi tanaman pangan ataupun tanaman industri yang diekspor. Beberapa pekerjaan malah dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti halnya menanam bibit, menabur benih dan menyiangi. Dalam proses budi daya, nyaris tak ada benih jatuh ke bumi tanpa sentuhan tangan perempuan. Bahkan dalam pengairan yang selama ini dianggap pekerjaan laki-laki, perempuan ternyata ikut menentukan kapan pengairan dilakukan, banyaknya kuantitas air, kedalaman air, frekuensi pengairan, termasuk menjadi bagian kerja laki-laki. Tanpa keterlibatan perempuan, proses produksi tak akan berlangsung, termasuk komoditi ekspor yang diperdagangkan secara internasional.

Pembagian kerja secara seksual di bidang pertanian merupakan sesuatu yang wajar, karena bersumber pada perbedaan struktur genetik dari laki-laki dan perempuan. Perempuan diidentikkan dengan pekerjaan ringan dan tidak banyak menuntut kekuatan fisik atau pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Sedangkan laki-laki diidentikkan dengan pekerjaan yang kasar, membutuhkan kekuatan fisik dan otot. Sebenarnya ciri masyarakat modern telah diperkenalkan oleh Durkheim sebagai masyarakat di mana terjadi pembagian kerja yang berinteraksi dalam solidaritas organik dan menjadi dasar bagi munculnya konsep masyarakat maju dengan ciri adanya diferensiasi struktural dan spesialisasi fungsional. Dalam perkembangannya, pembagian kerja tidak

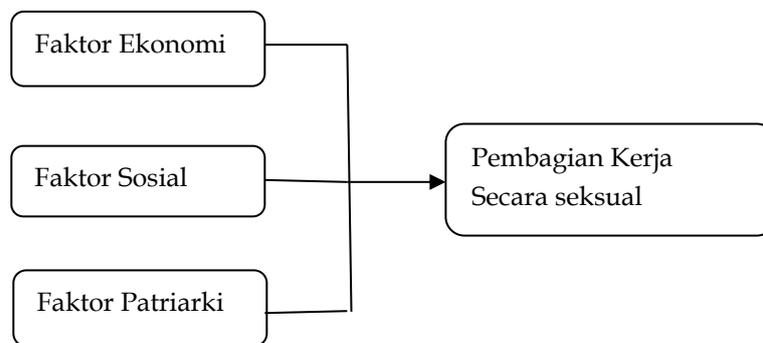
hanya berhenti pada pembagian jenis-jenis pekerjaan tetapi juga pembagian kerja secara seksual, di mana menjadi pembagian kerja berdasar perbedaan laki-laki dan perempuan. Pembagian kerja menurut gender disesuaikan dengan keadaan dan kondisi fisik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Seperti tingkah laku, kemampuan, keahlian dan kualitas yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang disesuaikan dengan karakteristik maskulinitas atau feminitas. Pembagian kerja berdasar gender menghubungkan norma-norma dan proses sosial-budaya masyarakat yang membentuk sifat feminin dan maskulin untuk laki-laki dan perempuan. Dimana pekerjaan untuk laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari gender, atau kemampuan dari fungsi masing-masing.

Gagasan yang dikembangkan oleh Barbara Rogers mengemukakan bahwa pada akhirnya pembagian kerja bersifat deterministik di mana perempuan semakin dibawa pada peran domestiknya dalam rumah tangga dan semakin terpisah dari peran publik (Nugroho, 2008). Kenyataan ini mengarah pada isu posisi tawar menawar antara laki-laki dan perempuan bahwa laki-laki lebih diuntungkan mengingat penghasilan dari mereka bekerja, perempuan kurang diuntungkan karena mereka tidak mendapat penghasilan dari pekerjaannya. Ketidaksejajaran ini diperparah oleh sistem politik dan sosial yang menjadikan laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Ketidaksejajaran ini berlanjut dari generasi ke generasi dan menciptakan nilai baru bahwa laki-laki dan perempuan adalah berbeda dan tidak sejajar.

Adanya anggapan tersebut bahwa perempuan hanya dapat melakukan pekerjaan ringan dan bersifat kerumah-tangga menyebabkan perempuan sulit mengembangkan dirinya di sektor publik. Di sektor publik perempuan belum terlalu mendapat tempat, hal ini terbukti dengan masih sedikitnya perempuan yang bekerja pada sektor publik atau sektor informal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Goldin dan Reskin yang dikutip oleh Hannah Riley Bowles & Kathleen L. McGinn dalam *Gender in Job Negotiations: A Two-Level Game : "Traditional gender ideologies influence the distribution of paid labor between men and women within organizations and that the sex segregation of women in lower paying occupations constrains their bargaining power in negotiations over household labor"* (Bowles, 2008). Ideologi gender tradisional mempengaruhi pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender menyebabkan perempuan semakin tersisih. Perbedaan gender juga menyebabkan perbedaan atau diskriminasi upah bagi perempuan, dimana perempuan mendapat gaji atau upah lebih kecil dibanding laki-laki.

Masalah patriarki menjadi salah satu sebab dari sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Sistem patriarki yang berlaku dimasyarakat

dimana kekuasaan kaum lelaki yang mendominasi, mensubordinasi dan deskriminasi kaum perempuan atas badannya, seksualitasnya, pekerjaannya, perannya dan statusnya baik dalam keluarga maupun masyarakat sangat memojokkan keberadaan perempuan. Hal ini juga berlaku pula di pertanian, dimana perempuan diberi jatah pekerjaan yang bersifat “feminim” yang membutuhkan ketelitian, kesabaran dan tidak terlalu berat. Anggapan bahwa perempuan itu lemah sebenarnya sangat merugikan, karena dengan jatah pekerjaan yang ringan tersebut tentu saja akan berdampak pada rendahnya upah yang diterima pekerja perempuan. Adanya pelabelan ini masih sangat mempengaruhi pola perilaku masyarakat termasuk didalamnya adanya sistem pembagian kerja. Adanya diskriminasi kaum perempuan dalam pekerjaan mengakibatkan adanya perbedaan upah dari pertanian, dan tergambar dari bagan di bawah ini:



Dari pembagian kerja tersebut menimbulkan perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan. Dimana buruh laki-laki mendapat upah lebih besar daripada perempuan. Senada dengan hasil penelitian Syamsiar (2020), sistem pengupahan buruh tani di Desa Jerowaru sangat berbeda-beda, misalnya dalam menanam atau memupuk padi, tembakau atau tanaman lainnya akan berbeda upah. Dengan adanya perbedaan upah buruh tersebut masih relative sangat rendah walaupun mereka masih mempunyai *skill* yang rendah tapi tidak semua orang mempunyai keahlian seperti itu. Mencari buruh tani sebenarnya sangat sulit tergantung dari pekerjaan mereka ketika sedang free, karena rata-rata yang menjadi buruh tani adalah orang dengan pekerjaan serabutan. Sehingga dari latar belakang tersebut diatas terdapat permasalahan dalam sistem pemberian upah buruh tani antara laki-laki dengan perempuan, dimana akan menyangkut problematika kesetaraan gender tentang hak dan kewajiban sebagai sebuah konstruksi sosial yang hadir di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini disebabkan bahwa pekerjaan laki-laki dianggap lebih berat dan lebih banyak menggunakan otot dibandingkan perempuan. Keadaan tersebut dapat menunjukkan relasi antara buruh laki-laki dan buruh perempuan yang cenderung terdapat bias gender. Perbedaan upah yang terjadi seringkali memanipulasi ideologi gender sebagai suatu pembenaran. Ideologi gender adalah segala aturan, nilai, pelabelan yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki terlebih dahulu melalui pembentukan identitas feminin dan maskulin. Karena tugas utama perempuan adalah di sektor domestik, maka pada saat ia masuk ke sektor publik, maka sah-sah saja untuk memberikan upah lebih rendah karena pekerjaan di sektor publik hanya sebagai kerja sampingan untuk membantu keuangan rumah tangga.

Pada masyarakat tradisional, pembagian peran atau kerja telah terbukti mampu menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dengan demikian, pembagian peran laki-laki dan perempuan mutlak diperlukan demi mencapai keharmonisan keluarga dan masyarakat. Segregasi sosial yang menjadikan dominasi pekerjaan pada sektor publik oleh kaum laki-laki khususnya untuk pekerjaan berat atau kerja kasar, kaum laki-laki diharuskan secara sosial bekerja keras untuk mencari dan mencukupi nafkah keluarganya, terdiri atas perempuan dan anak-anak. Hubungan patriarki yang membagi peran perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik, secara turun temurun telah diyakini kebenarannya dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pewarisan budaya tersebut melalui pembiasaan budaya dan adat istiadat sejak anak baru dilahirkan. Kemudian secara estafet generasi muda menerimanya tanpa kritik dan keraguan. Pada akhirnya gender secara sosial menjadi budaya dominan yang diterima oleh antar generasi sebagai suatu kebenaran.

Peran Perempuan Dalam Pembangunan Pertanian

Pembangunan juga tidak lain dari perluasan proyek menciptakan kekayaan, menurut teori ekonomi modern patriarki Barat yang memeras dan menyingkirkan perempuan (Barat dan non-Barat), memeras dan merusak alam, memeras dan merusak kebudayaan. Oleh sebab itu, pembangunan tidak boleh berarti menghancurkan perempuan, kebudayaan dan alam (Shiva, 1997 dalam Mulyawan, 2002). Konsep pembangunan yang diterapkan di seluruh dunia kini adalah konsep barat, pada intinya akan mengubah alam kehidupan tradisional menjadi modern yang diwujudkan dalam struktur ekonomi industri untuk menggantikan struktur ekonomi pertanian. Di dalam masyarakat seringkali perempuan menjadi warga kelas dua (*konco wingking*), dan menjadi obyek dari berbagai upaya perubahan yang disusun dalam kerangka berfikir yang mengacu pada asumsi yang sangat bias laki-laki. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor

yang menjelaskan mengapa perempuan tertinggal atau ditinggalkan dalam proses pembangunan pertanian.

Pada umumnya di dalam program-program pembangunan di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Desa, baik laki-laki maupun perempuan tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan. Hampir semua program kebijaksanaan bersifat *top down*, sehingga masyarakat hanya tinggal sebagai pelaksana program tersebut. Norma-norma tradisional seringkali masih tetap dijadikan acuan dalam menyusun program kebijaksanaan dan terjadi penyeragaman kebijakan untuk pembangunan di pedesaan. Di tingkat desa akses laki-laki terhadap program pembangunan lebih besar daripada perempuan.

Dari pembahasan konsep perempuan terletak pada konsep kodrat perempuan yang tersosialisasi dalam masyarakat sekarang ini sesungguhnya mengandung suatu pengertian penguatan mitos tentang perempuan. Harus diakui bahwa konsep kodrat membatasi pencarian solusi atas permasalahan perempuan. Oleh sebab itu, ada gagasan untuk meninggalkan konsep kodrat dan digantikan dengan konsep martabat perempuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh perempuan saat ini. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa perempuan terlibat dalam pembangunan. Berkenaan dengan hal ini persoalan yang tersisa adalah bagaimanakah dampak pembangunan di negeri ini terhadap perempuan (Noerhadi, 1989).

Di Afrika, dimana perempuan menanam sebagian besar tanaman pangan, praktik yang konsisten mengenai pentargetan laki-laki dan akses terhadap tanah dan *input* pertanian, tidak mengikutsertakan perempuan, berpengaruh besar atas jumlah bahan pangan yang ditanam. Keyakinan tentang peran perempuan juga mempengaruhi proses *land reform* di berbagai belahan dunia. Asumsi bahwa laki-laki adalah petani menimbulkan akibat dalam pengakuan hak-hak tanah formal kepada laki-laki, sekali pun secara tradisional perempuan menggunakan tanah tersebut untuk menanam bahan pangan baginya keluarganya (Moose, 1996).

Peran perempuan sekarang ini sudah terlihat nyata dalam berbagai bidang, mereka telah banyak yang berpendidikan tinggi, mereka tak canggung dalam berjuang di masyarakat menurut bakat dan kemampuannya masing-masing. Misalnya, banyak Insinyur pertanian sebageaian besar adalah perempuan, jadi sangatlah besar peran perempuan di bidang pembangunan pertanian di berbagai daerah. Dengan memosisikan dirinya sebagai pembuat lapangan kerja di bidang pertanian, sebagai motivator, dinamisator dibidang pertanian baik yang bergerak di swasta maupun di pemerintahan.

Sebagai salah satu peran perempuan dalam membangun pembangunan pertanian yaitu dengan ikut berperan dalam menciptakan program-program yang mengarah pada pemberdayaan perempuan dengan meluncurkan program diversifikasi pangan dan gizi yaitu sebuah program yang berupaya mengintensifikasi pekarangan sebagai salah satu gerakan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Perempuan tani harus pandai mengatur, mengelola penghasilan yang relatif rendah agar mencukupi kebutuhan keluarga. Banyak perempuan tani yang bergerak dalam sektor perdagangan hasil pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan.

Sementara itu, perempuan tani di pedesaan juga mengurus anak-anak dan mungkin orang tua yang tinggal bersamanya. Bagi yang tidak memiliki lahan garapan, ia mencari nafkah sebagai buruh tani. Pada kenyataannya, perempuan buruh tani menerima upah lebih rendah dibanding laki-laki. Situasi tersebut terasa berat bagi perempuan petani yang sekaligus merangkap kepala keluarga yang harus menanggung anak-anak. Guna meminimilasi semakin banyaknya tenaga kerja muda yang hijrah ke sektor lain (non pertanian), perempuan tani yang berkiblat pada pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian memerlukan dukungan berbagai pihak. Hal ini penting untuk memberi keyakinan pada generasi muda, kader-kader pelaku bisnis pertanian bahwa sektor ini mampu memberikan jaminan hidup layak.

Pendekatan Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah

Pendekatan pertanian berwawasan gender yang dinyatakan sebagai kunci wawasan gender, meliputi peran gender, kelompok yang tidak beruntung dan partisipasi. Hal tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa perempuan dan laki-laki secara sosial dibedakan sehingga disebut peran gender. Peran gender tersebut bersifat dinamis yang dapat berbeda karena waktu, tempat, etnis, maupun strata sosial masyarakat. Peran gender berkaitan erat dengan pembagian kerja. Selain itu diperlukan adanya penyadaran bahwa pembangunan harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas bagi pria dan perempuan. Oleh karena itu penelitian aspek sosial ekonomi tidak bisa hanya mengacu pada aspek pria, karena secara alami perempuan berbeda dengan pria tetapi sebagai sumberdaya manusia mereka semestinya mendapat perlakuan yang sama.

Pemahaman gender sangat penting untuk disosialisasikan. Masih kurang disadari bahwa potensi perempuan cukup besar, lebih-lebih bila dikaitkan dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih besar daripada pria. Di dalam masyarakat, meskipun peran perempuan dan pria sangat penting, namun dalam

berbagai kategori sosial dan ekonomi, perempuan kurang beruntung dibandingkan pria. Pengalaman menunjukkan adanya pembagian kerja yang tidak adil, akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan yang masih rendah. Bahkan kadangkala peran mereka di rumah tangga untuk mempertahankan ketahanan pangan dan mata pencaharian juga tidak dianggap penting.

Oleh karena itu dalam pertanian yang berwawasan gender, peranan dan prioritas perempuan dan pria tidak dilihat secara terpisah tetapi secara bersama-sama. Hal tersebut berkaitan dengan proses pembangunan itu sendiri yang menginginkan perubahan kehidupan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, khususnya pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Kelompok tersebut adalah kelompok yang mengalami kekurangan sumberdaya yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, air; pelayanan kesehatan, perumahan, serta faktor sosial-ekonomi yang dapat mempengaruhi perlakuan-perlakuan diskriminasi yang mengakibatkan kemiskinan. Padahal, penghapusan kemiskinan merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Banyak isu gender yang ditemukan di bidang pertanian, karena terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu kesetaraan gender ini lebih khusus lagi terefleksi dalam dalam hal akses terhadap peluang dan kesempatan, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, serta perolehan manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Kebijakan Pemerintah melalui nota kesepahaman, baik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) maupun Kementerian Pertanian (Kementan), bertujuan untuk mengupayakan perwujudan kesetaraan gender di Bidang Pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa hak tradisional kaum perempuan, termasuk hak anak, tidak dihilangkan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam pertanian beserta hasil-hasilnya.
2. Memastikan akses yang setara untuk kaum perempuan dan kaum laki-laki terhadap informasi permodalan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian.
3. Mengupayakan langkah-langkah untuk menghindari konflik potensial diantara pemanfaat lahan dan pengairan pertanian dan memastikan adanya kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan prioritas program pertanian.

4. Mengupayakan peningkatan ketrampilan perempuan melalui pengenalan teknologi baru yang dapat diimplementasikan secara efektif dan terjangkau.
5. Melatih mitra kerja dibidang pertanian (baik mitra untuk kepentingan profit maupun non profit) sehingga peka terhadap pola diversifikasi usaha pertanian oleh kaum perempuan dan laki-laki, serta dapat mengetahui persoalan serta kebutuhan kaum perempuan.
6. Membantu kaum perempuan maupun laki-laki memahami pola tanam, sistem irigasi dan produksi pertanian.

Untuk upaya-upaya tersebut diperlukan adanya analisis dengan perspektif gender pada saat menyusun kebijakan atau program dibidang pertanian dari tahapan perencanaannya, penganggarannya, pelaksanaannya, monitoring dan evaluasinya. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan porsi dan kapasitas perempuan yang selama ini mungkin belum mendapatkan kesempatan yang sama di bidang pertanian. Kesepakatan bersama ini merupakan langkah awal untuk mengembangkan mekanisme dan sistem perencanaan dan anggaran yang baru dengan memakai lensa gender di Kementerian Pertanian.

SIMPULAN

Dari pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, pembangunan dalam bidang pertanian, peran perempuan cenderung kurang berarti dan terjadi ketidaksetaraan gender. Hal ini menyebabkan peran perempuan kurang maksimal dan terlihat dalam pembangunan pertanian. Peran perempuan cenderung hanya dalam pekerjaan yang sederhana, sedangkan peran pria dalam pertanian lebih menonjol khususnya untuk proses produksi. Ketidaksetaraan gender tersebut masih dipengaruhi oleh lingkungan sosial-budaya dan masih menganggap peran perempuan sebagai nomor dua setelah pria.

Masalah patriarki menjadi salah satu sebab dari sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Sistem patriarki yang berlaku dimasyarakat dimana kekuasaan kaum lelaki yang mendominasi, mensubordinasi dan deskriminasi kaum perempuan atas badannya, seksualitasnya, pekerjaannya, perannya dan statusnya baik dalam keluarga maupun masyarakat sangat memojokkan keberadaan perempuan. Hal ini juga berlaku pula dipertanian, dimana perempuan diberi jatah pekerjaan yang bersifat "feminim" yang membutuhkan ketelitian, kesabaran dan tidak terlalu berat. Anggapan bahwa perempuan itu lemah sebenarnya sangat merugikan, karena dengan jatah

pekerjaan yang ringan tersebut tentu saja akan berdampak pada rendahnya upah yang diterima pekerja perempuan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Disampaikan ucapan terima kasih memuat apresiasi yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penulisan artikel, baik dalam bentuk support, konsultan, maupun membantu dalam pengambilan data. Penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada editor yang telah menelaah dan mereview Jurnal Setara: Studi Gender dan Anak.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Sebagai penulis tunggal mempunyai peran utama dan mutlak dalam proses pembuatan atau pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan keluaran artikel ilmiah.

REFERENSI

- Aboim, S. (2010). Gender cultures and the division of labour in contemporary Europe: A cross-national perspective. *The Sociological Review*, 58(2), 171–196. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2010.01899.x>
- Allwood, G. (2020). Gender equality in European Union development policy in times of crisis. *Political Studies Review*, 18(3), 329–345. <https://doi.org/10.1177/1478929919863224>
- Barrett, C., Smith, K., Box, P., 2001. Not necessarily in the same boat: heterogeneous risk assessment among east African pastoralists. *J. Dev. Stud.* 37, 1–30. <https://doi.org/10.1080/00220380412331322101>.
- Badstue, L.B., Kantor, P., Prain, G., Ashby, J., 2014. Innovation and Development Through Transformation of Gender Norms in Agriculture and Natural Resource Management: A concept note for GENNOVATE.
- Badstue, L., Elias, M., Kommerell, V., Petesch, P., Prain, G., Pyburn, R., Umantseva, A., 2020. Making room for manoeuvre: addressing gender norms to strengthen the enabling environment for agricultural innovation. *Dev. Pract.* 30, 541–547. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1757624>.
- Bowles, Hannah Riley & Kathleen L. McGinn, 2008, *Gender in Job Negotiations: A Two-Level Game*, Harvard School of Business International Journal, RWP08-027, NOM Working Paper No.08-095.
- Budiman, Arief, 1985, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Jakarta: Gramedia.

- Budhwar, P. S., Saini, D. S., & Bhatnagar, J. (2005). Women in management in the new economic environment: The case of India. *Asia Pacific Business Review*, 11(2), 179–193. <https://doi.org/10.1080/1360238042000291199>
- Bui, T. M. H., Vo, X. V., & Bui, D. T. (2018). Gender inequality and FDI: Empirical evidence from developing Asia-Pacific countries. *Eurasian Economic Review*, 8, 393–416. <https://doi.org/10.1007/s40822-018-0097-1>
- Cai, C., & Dahiya, B. (2020). Gender equality in asia-pacific: Reflections on the Beijingp 25 review. *Space and Culture, India*, 8(3), 7–17. <https://doi.org/10.20896/saci.vi0.1000>
- Carr, E.R., Thompson, M.C., 2014. Gender and climate change adaptation in agrarian settings: current thinking, new directions, and research *Frontiers. Geogr. Compass* 8, 182–197. <https://doi.org/10.1111/gec3.12121>.
- Cong, L. (2008). Does the current position of women in the labour market in Asia Pacific countries signal an end to gender inequality? *International Journal of Business and Management*, 3(6), 118–122.
- Corbett, C., & Hill, C. (2012). Graduating to a pay gap: The earnings of women and men one year after college graduation. Washington, DC: American Association of University Women. 1111 Sixteenth Street NW, Article 20036.
- Cullen, A.C., Anderson, C.L., Biscaye, P., Reynolds, T.W., 2018. Variability in cross-domain risk perception among smallholder farmers in Mali by gender and other demographic and attitudinal characteristics. *Risk Anal.* 38, 1361–1377. <https://doi.org/10.1111/risa.12976>.
- de Janvry, A., Fafchamps, M., Sadoulet, E., 1991. Peasant household behaviour with missing markets some paradoxes explained. *Econ. J.* 101, 1400–1417.
- Dilli, S., Carmichael, S. G., & Rijpma, A. (2019). Introducing the historical gender equality index. *Feminist Economics*, 25(1), 31–57. <https://doi.org/10.1080/13545701.2018.1442582>
- Duong, T.T., Brewer, T., Luck, J., Zander, K., 2019. A global review of Farmers' perceptions of agricultural risks and risk management strategies. *Agriculture* 9, 10. <https://doi.org/10.3390/agriculture9010010>.
- Farnworth, C.R., Badstue, L., Williams, G.J., Tegbaru, A., Gaya, H.I.M., 2020. Unequal partners: associations between power, agency and benefits among women and men maize farmers in Nigeria. *Gend. Technol. Dev.* 24, 271–296. <https://doi.org/10.1080/09718524.2020.1794607>.
- Fisher, M., Carr, E.R., 2015. The influence of gendered roles and responsibilities on the adoption of technologies that mitigate drought risk: the case of

- drought-tolerant maize seed in eastern Uganda. *Glob. Environ. Chang.* 35, 82–92. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.08.009>.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Penelitian Gender*. Universitas Muhammadiyah Malang: Jawa Timur.
- Hansen, J., Hellin, J., Rosenstock, T., Fisher, E., Cairns, J., Stirling, C., Lamanna, C., van Etten, J., Rose, A., Campbell, B., 2019. Climate risk management and rural poverty reduction. *Agr. Syst.* 172, 28–46. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.01.019>.
- Harvey, E. B., Blakely, J. H., & Tepperman, L. (1990). Toward an index of gender equality. *Social Indicators Research*, 22, 299–317. <https://doi.org/10.1007/BF00301104>.
- Harwood, J., Richard, H., Coble, K., Perry, J., Somwaru, A., 1999. Managing Risk in Farming: Concepts, Research, and Analysis. (No. 774), Agricultural Economic Report, Agricultural Economic Report. Washington, DC.
- Kabeer, N., 1999. Resources, agency, achievements: reflections on the measurement of women's empowerment. *Dev. Change* 30, 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>.
- Key, N., Sadoulet, E., De Janvry, A., 2000. Transactions costs and agricultural household supply response. *Am. J. Agric. Econ.* 82, 245–259. <https://doi.org/10.1111/0002-9092.00022>.
- Looze, M. D., Huijts, T., Stevens, G. W., Torsheim, T., & Vollebergh, W. A. (2018). The happiest kids on earth. Gender equality and adolescent life satisfaction in Europe and North America. *Journal of Youth and Adolescence*, 47, 1073–1085. <https://doi.org/10.1007/s10964-017-0756-7>
- Meinzen-Dick, R., Johnson, N., Quisumbing, A., Njuki, J., Behrman, J., Rubin, D., Peterman, A., Waithanji, E., 2011. Gender, Assets. In: *And Agricultural Development Programs* (No. 99), CAPRI Working Paepers, CAPRI Working Papers. Washington, DC. <https://doi.org/10.2499/CAPRIWP99>.
- Mosse, Juia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Editor: Hartian Silawati, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar. Terjemahan dari: *Half the World, Half a Chance An Introduction to Gender and Development*.
- Muliawan, Andri. 2002. *Analisis Gender Dalam Program-program Pembangunan Bidang Pertanian*. Diajukan sebagai skripsi pada Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Pertanian, IPB.

- Murray-Prior, R., 1998. Modelling farmer behaviour: a personal construct theory interpretation of hierarchical decision models. *Agr. Syst.* 57, 541–556. [https://doi.org/10.1016/S0308-521X\(98\)00008-0](https://doi.org/10.1016/S0308-521X(98)00008-0).
- Noerhadi, T.H 1989. “*Bagaimana Mengatasi Kodrat*”, Vol. VI, No. 2, Pesantren.
- Nugroho, Rian, 2008, *Gender dan Administrasi Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Quinn, C.H., Huby, M., Kiwasila, H., Lovett, J.C., 2003. Local perceptions of risk to livelihood in semi-arid Tanzania. *J. Environ. Manage.* 68, 111–119. [https://doi.org/10.1016/S0301-4797\(03\)00013-6](https://doi.org/10.1016/S0301-4797(03)00013-6).
- Rengalakshmi, R., Manjula, M., Deveraj, M., 2018. Making climate information gender sensitive: lessons from Tamil Nadu. *Econ. Pol. Wkly* 53, 87–95.
- Smith, K., Barrett, C.B., Box, P.W., 2000. Participatory risk mapping for targeting research and assistance: with an example from east African pastoralists. *World Dev.* 28, 1945–1959. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(00\)00053-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00053-X).
- Syamsiar, Huldiya., 2020. Kesenjangan upah buruh tani perempuan dengan laki-laki (problematika gender). *Jurnal Masyarakat Maritim*, 04 (2).
- Teklewold, H., Adam, R.I., Marennya, P., 2020. What explains the gender differences in the adoption of multiple maize varieties? Empirical evidence from Uganda and Tanzania. *World Dev. Perspect.* 18, 100206 <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100206>.
- Timu, A.G., Kramer, B., 2021. Gender-inclusive, □ responsive and-transformative agricultural insurance: A literature review (No. 417). In: CCAFS working paper. Wageningen, the Netherlands.
- Vakis, R., Sadoulet, E., de Janvry, A., Cafiero, C., 2004. Testing for Separability in Household Models with Heterogeneous Behavior: A Mixture Model Approach (No. 990), CUDARE Working Papers. Berkeley.
- Walby, S. (2004). The European Union and gender equality: Emergent varieties of gender regime. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 11(1), 4–29. <https://doi.org/10.1093/sp/jxh024>